

| SUBSIDI BUS TRANSJABODETABEK |

BOGOR & BEKASI
JADI PRIORITAS

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berencana mensubsidi layanan bus Transjabodetabek dari titik pemberangkatan di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada tahun depan, sebagai angkutan alternatif selama pandemi virus corona.

Rinaldi M. Azka & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jabodetabek agar angkutan alternatif bersubsidi itu terintegrasi dengan layanan angkutan kota (angkot) di wilayah masing-masing.

Pada tahap awal, layanan bus Transjabodetabek bersubsidi akan diimplementasikan di Kota Bogor terutama dari titik keberangkatan Terminal Bus Baranangsiang dan Terminal Bubulak menuju terminal bus yang ada di DKI Jakarta dan Bekasi.

"Jika Transjabodetabek ini dapat terintegrasi dengan baik secara sistem dengan angkot yang ada di Kota Bogor maka akan dapat diandalkan menjadi angkutan alternatif," katanya, Senin (3/8).

Saat ini, lanjutnya, di Kota Bogor sudah terdapat layanan bus Transjabodetabek dari Terminal Bus Baranangsiang dan Terminal Bubulak menuju terminal bus yang ada di Jakarta dan bahkan Bekasi.

Sebagai angkutan umum reguler berjadwal, Transjabodetabek yang di Kota Bogor sangat memungkinkan untuk diberikan subsidi sehingga tarifnya lebih terjangkau lagi. Bila hal itu bisa teralisasi pada 2021, dia menegaskan layanan itu bisa menjadi alternatif moda bagi pengguna kereta rel listrik (KRL) Commuter Line yang hingga kini masih dibatasi kapasitasnya. Selain itu, layanan bus Transjabodetabek bisa menjadi alternatif moda bagi masyarakat di Jabodetabek yang memiliki keterbatasan finansial mengingat bus gratis yang disediakan di sejumlah stasiun di Bogor dan Bekasi hanya berlangsung hingga Desember 2020.

Polana mengungkapkan pihaknya melanjutkan layanan bus gratis bagi pengguna KRL hingga akhir tahun ini serta akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Langkah itu terutama untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada KRL karena kemam-

puan finansial yang terbatas, manakala mereka tidak tertampung sarana KRL karena keharusan penegakan protokol kesehatan.

"Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat," papar Polana.

Selain solusi subsidi bus Transjabodetabek, BPTJ juga menyediakan layanan bus Jabodetabek Residence (JR) Connexion di wilayah Bogor dan sekitarnya.

"Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodasi kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodasi (oleh) KRL."

Titik pemberangkatan JR Connexion dari tempat yang berdekatan dengan pemukiman calon penumpang menuju titik tertentu di Jakarta dengan sifat layanan *point to point*.

Direktur Angkutan BPTJ Aca Mulyana menambahkan telah meluncurkan layanan baru JR Connexion dari titik pemberangkatan di Sentul City serta di Perumahan Taman Sari Persada Kota Bogor.

Dua titik keberangkatan lain yaitu Grand Central Stasiun Bogor dan Botani Square Bogor juga tengah diujicobakan mulai Senin (3/8). Dua operator bus pelat merah terlibat dalam layanan itu yaitu Perum PPD dan Perum DAMRI.

"[Uji coba JR Connexion] perkiraan 1 bulan," kata Aca.

PERAN PEMDA

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta pemda penyangga Jakarta perlu mendukung layanan bus JR Connexion.

Pemda bahkan berupaya untuk mendapatkan bantuan program pembelian layanan (*buy the service*) dari Ditjen Perhubungan Darat Ke-

“

[Uji coba JR Connexion] perkiraan 1 bulan.

menhub untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya.

"Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program *buy the service* untuk pemda di wilayah Bodetabek," jelasnya.

Selama pandemi Covid-19, angkot yang beroperasi di Jabodetabek sangat tidak layak.

Menurutnya, pemda di Jabodetabek bisa meningkatkan fasilitas pesepeda di semua jaringan jalan untuk digunakan perjalanan jarak pendek.

Sebaliknya, VP Corporate Communications PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) Anne Purba menegaskan penumpang KRL terus bertambah dengan rata-rata pertambahan sekitar 3% dibandingkan dengan Senin pekan lalu.

Sejumlah stasiun yang mengalami peningkatan antara lain di Stasiun Bogor, Bojongsari, dan Rangkasbitung.

Sejak 1 Agustus 2020, KCI telah mengoperasikan 971 perjalanan KRL.

Pemerhati transportasi perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai ketepatan pelaku usaha menjalankan pembagian kerja atau sif menjadi kunci utama untuk menyesuaikan pergerakan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. "Jika kantor sudah mengurangi kegiatan maka efektivitas ganjil genap akan berpengaruh," katanya.

Saat ini, dia mengkhawatirkan timbulnya persoalan baru di angkutan umum jika pelaku usaha belum menjalankan sistem. (Anitana W. Puspa) ☒

| KONSTRUKSI SELAMA COVID-19 |

Proyek Infrastruktur Tetap Lanjut

Bisnis, JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menyatakan proses kerja di berbagai proyek yang digarap perseroan, belum pulih 100% akibat pandemi Covid-19, meskipun pemerintah telah menetapkan fase adaptasi kebiasaan baru. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menjelaskan proyek yang sedang berjalan memang bisa dilanjutkan.

"Proyek-proyek masih berjalan, walaupun kami akui belum bisa 100% kembali seperti masa sebelum pandemi," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (3/8).

Menurutnya, kondisi itu disebabkan perseroan harus membatasi jumlah pekerja yang berada di satu area kerja, sehingga kapasitasnya menjadi

berkurang. Namun, dia menegaskan hal itu tidak bisa digeneralisasi, karena setiap proyek memiliki kondisi yang berbeda di lapangan.

Selama pekerjaan terus dilanjutkan, WIKA tetap menerapkan protokol kesehatan yang sesuai ditetapkan dan Kementerian PUPR.

"Memang ada [pekerja] yang menjadi *suspect* atau diduga terinfeksi Covid-19 dulu, tetapi saat ini relatif sudah berjalan kembali dan kami tetap menjalankan proyek sesuai dengan protokol kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Manager Sekretariat dan Humas PT Brantas Abipraya Rudi Pudianto menjelaskan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat untuk mengantisipasi penyebar-

an Covid-19. Saat ini, perseroan sudah membentuk Satuan Tugas Covid-19 di kantor pusat sejak 27 Maret 2020.

Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri No.02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Instruksi Menteri tersebut sudah saya masih berlaku, oleh karena itu Brantas Abipraya tetap memberlakukan protokol Kesehatan secara ketat sehubungan dengan Covid-19 terutama pada pekerja-pekerja di lapangan," ujarnya.

Selama 3 bulan terakhir, para pekerja di lapangan selalu menaati protokol kesehatan yang diterapkan di masing-masing proyek. (Arif Gunawan)

www.bca.co.id

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 30 Juli 2020

Tempat: Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310

Waktu: 10.23 s.d 11.13 WIB

Acara: 1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan; dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2020, Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris : Tuan Tony Kusnadi*
Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo*
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede*
Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet*

Direksi
Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur : Tuan Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono*
Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur Independen : Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum*
Direktur : Tuan Henry Koenafi
Direktur : Tuan Rudy Susanto
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono*
Direktur : Tuan Santoso*
Direktur : Nona Vera Eve Lim
Direktur : Tuan Gregory Tiendra Lembong*
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan Haryanto Tira Budiman*

*hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 22.170.860.467 saham atau 89,924% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
- Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui *eASY.KSEI* sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registrasi selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
- Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang penghitungan suaranya mengacu pada butir 3 diatas;
- Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

Hasil Keputusan

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk" Nomor 264 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	18.439.676.241 (83,171%)	3.692.397.211 (16,654%)	38.787.015 (0,175%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia atau sebanyak 99,999973% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia.
- Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juli 2020, dan menyetujui konsep akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat tersebut tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	17.829.823.261 (80,420%)	4.134.906.735 (18,650%)	206.130.471 (0,930%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilh tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

AYO NAIK BUS!

Keputusan operator kereta rel listrik (KRL) Commuter Line membatasi maksimal 74 orang per kereta selama transisi pembatasan sosial berskala besar memicu banyak calon penumpang yang tak terangkut kereta. Solusinya, pemerintah menyediakan layanan bus gratis sementara guna mencegah penumpukkan penumpang KRL. Kini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga meluncurkan layanan Jabodetabek Residence Connexion langsung dari lokasi perumahan dan stasiun di Bodetabek.

Uji Coba Trayek Baru Jabodetabek Residence Connexion

Trayek	Operator
Sentul City kabupaten Bogor-Blok M Jakarta	Perum PPD
Tamansari Persada Kota Bogor-Blok M Jakarta	Perum PPD
Tamansati Persada Kota Bogor-Stasiun Juanda Jakarta	Perum PPD
Grand Central Stasiun Bogor-Stasiun Juanda Jakarta	Perum PPD
Grand Central Stasiun Bogor-Stasiun Manggarai Jakarta	Perum PPD
Grand Central Stasiun Bogor-Stasiun Tebet Jakarta	Perum PPD
Botany Square Kota Bogor-Stasiun Juanda Jakarta	Perum DAMRI
Botany Square Kota Bogor-Dukuh Atas/Stasiun Sudirman Jakarta	Perum DAMRI

Sumber: BPTJ

Bisnis/Adi Pramono

Pergerakan
Manusia Harian
di Wilayah
Jabodetabek2018
88 juta
per hariSumber: Badan
Pengelola Transportasi
Jabodetabek, diolah